

Judul : Analisa Pertumbuhan Dan Pengembangan Wilayah Kota Pekanbaru
Tahun : 2010
Penulis : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau
Kategori : Perencanaan Wilayah dan Infrastruktur

Perkembangan kota merupakan proses perubahan dinamis yang dipengaruhi oleh faktor fisik, sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Kota Pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi Riau mengalami percepatan pertumbuhan yang signifikan dalam dua dekade terakhir, ditandai dengan konversi lahan pertanian menjadi kawasan terbangun, peningkatan jumlah penduduk, serta ekspansi aktivitas ekonomi ke wilayah pinggiran (urban fringe). Peningkatan ini membawa implikasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun juga menimbulkan berbagai permasalahan tata ruang, lingkungan, dan sosial akibat ketidakterkendalian pola pembangunan permukiman.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengkaji arah dan luas perkembangan fisik Kota Pekanbaru akibat pertumbuhan wilayah perkotaan; serta (2) menganalisis dan memprediksi permasalahan lingkungan fisik, kimia, biologi, sosial ekonomi, dan budaya yang muncul sebagai dampak pengembangan wilayah. Metodologi yang digunakan meliputi analisis spasial perkembangan kota berdasarkan data tata ruang, penggunaan lahan, kependudukan, dan ekonomi; serta kajian kebijakan pembangunan di tingkat nasional, provinsi, dan kota. Unit analisis mencakup wilayah pusat kota (inner city) dan wilayah pinggiran (urban fringe).

Hasil analisis menunjukkan bahwa Kota Pekanbaru telah bertransformasi menjadi Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan luas wilayah mencapai 632,26 km². Pertumbuhan fisik kota mengarah ke selatan dan tenggara, terutama di Kecamatan Tenayan Raya, Tampan, dan Marpoyan Damai. Struktur ekonomi kota didominasi sektor tersier—perdagangan, jasa, dan transportasi—dengan kontribusi lebih dari 67% terhadap PDRB dan tingkat pertumbuhan rata-rata 9,59% (2004–2008). Namun, ekspansi permukiman yang sporadis dan tidak terintegrasi dengan sistem sarana-prasarana dasar menimbulkan permasalahan serius seperti banjir, inefisiensi infrastruktur, serta beban tambahan bagi pemerintah daerah. Secara sosial, tingginya angka migrasi menjadikan Pekanbaru kota multi-etnis dengan kepadatan penduduk 1.264 jiwa/km² (2009) dan dominasi usia produktif (67,23%).

Tantangan utama yang dihadapi meliputi: (1) pengendalian pola ruang dan pertumbuhan permukiman; (2) ketidakseimbangan antara laju pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja formal; serta (3) kebutuhan integrasi transportasi dan infrastruktur antarwilayah menghadapi prediksi status metropolitan tahun 2030. Oleh karena itu, strategi pengembangan diarahkan pada penguatan kerja sama antar kota/kabupaten sekitar (Kampar, Siak, Pelalawan), pengetatan izin tata ruang sesuai RTRW, peningkatan tanggung jawab pengembang terhadap penyediaan sarana dasar,

perluasan kesempatan kerja di sektor formal, dan optimalisasi pemisahan fungsi Bandara Sultan Syarif Kasim II untuk efisiensi transportasi udara.

Studi ini menyimpulkan bahwa keberlanjutan perkembangan Kota Pekanbaru memerlukan pendekatan tata ruang terpadu, kolaboratif, dan berkelanjutan antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat. Implementasi kebijakan yang konsisten serta pengendalian pembangunan berbasis keseimbangan lingkungan dan sosial menjadi kunci dalam mewujudkan Pekanbaru sebagai kota metropolitan yang tertata, produktif, dan berkelanjutan.